

Penerimaan Gerakan Sosial Transnasional Ikhwanul Muslimin di Turki Pasca Arab Spring

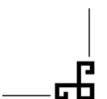
Nabhan Aiqani

Alumni Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Andalas Padang
Email: aiqoni.nabhan21@gmail.com

Abstract

This article discusses the acceptance of the Muslim Brotherhood (IM) movement in the middle of Turkish society after the Arab Spring. After the turmoil of the Arab Spring, this movement has been banned in various countries, ranging from Egypt, Syria, Jordan, to Saudi Arabia. On the contrary, IM continues to grow in Turkey. This article analyzes this phenomenon by using the concept of three categorization of the emergence of transnational social movements until they are accepted in a country, namely environmental change, cognitive change and relational change. Environmental change in Turkey shows that Turkey is currently controlled by the AKP Party and it begun to look at the strategic Middle East region. Cognitive change explains the IM appreciative attitude towards the current Turkish government. Relational change shows that IM, which faces restrictions many countries, needs to look for other political opportunities so that its movement continues to exist, so in this case of IM, it chooses Turkey. Relational change categorization found the connection between a social movement and the elite in government which can be explained by the concept of elite alliances, where social movements and the ruling government share interests on the basis of ideological similarities and views.

Keywords: *cognitive change, environmental change, elite alliances, relational change, Muslim Brotherhood, Turkey, transnational movement*



Abstrak

Artikel ini membahas tentang penerimaan gerakan Ikhwanul Muslimin (IM) di tengah masyarakat Turki pasca *Arab Spring*. Setelah bergolaknya *Arab Spring*, gerakan ini mengalami pelarangan di berbagai negara, mulai dari Mesir, Suriah, Yordania, hingga Arab Saudi. Sebaliknya, IM justru terus berkembang di Turki. Artikel ini akan menganalisis fenomena ini dengan menggunakan konsep tiga kategorisasi kemunculan gerakan sosial transnasional hingga kemudian diterima di suatu negara yaitu perubahan lingkungan (*environmental change*), perubahan kognitif (*cognitive change*) dan perubahan relasional (*relational change*). Perubahan lingkungan di Turki, menunjukkan bahwa Turki sekarang ini dikuasai oleh Partai AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) serta pemerintah mulai memandang strategis regional Timur Tengah. Perubahan kognitif menjelaskan sikap IM yang selalu apresiatif terhadap pemerintahan Turki saat ini. Perubahan relasional menunjukkan bahwa IM yang menghadapi pelarangan di berbagai negara berupaya mencari peluang politik agar gerakannya tetap eksis dan dalam kasus ini IM memilih Turki. Pada perubahan relasional ini ditemukan pula keterhubungan antara sebuah gerakan sosial dengan elit dalam pemerintahan yang dapat dijelaskan dengan konsep Aliansi Elit (*elite alliances*), di mana antara gerakan sosial dan pemerintahan yang berkuasa juga bisa saling berbagi kepentingan atas dasar kesamaan ideologi dan pandangan.

Kata kunci: *aliansi Elit, gerakan transnasional, Ikhwanul Muslimin, perubahan kognitif, perubahan lingkungan, perubahan relasional, Turki*

Pendahuluan

Al Ikhwan Al Muslimun atau Ikhwanul Muslimin (selanjutnya disebut IM) merupakan gerakan Islamis dunia yang menyediakan model aktivisme berbasis agama bagi gerakan yang meniru atau menjadi cabangnya (Mitchell, 1993: 8). Dalam perkembangannya, IM telah bertransformasi menjadi gerakan transnasional yang dipengaruhi oleh pemikiran Islam kontemporer, melalui banyak struktur dan asosiasi (Amghar, 2008: 68). Bukti bahwa gerakan IM telah menjadi gerakan transnasional dapat dilihat berdasarkan data internal yang disampaikan Mohammed Mahdi Akef, eks-pemimpin tertinggi IM Mesir yang tidak menampik realita mengenai jejaring “Ikhwanul Muslimin Internasional” (Amghar, 2008: 28). Pada dasarnya, jaringan transnasional didirikan sebagai manifestasi mobilitas dan solidaritas yang secara

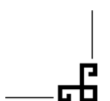
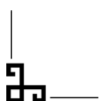


permanen akan menciptakan hubungan antara ruang geografis dan nasional yang berbeda (Amghar 2008: 65).

Perkembangan IM sendiri tidak lepas dari pengaruh Hasan Al Banna yang merupakan pemimpin sekaligus pendiri IM yang didirikannya pada Maret 1928 atau Dhu al-Qi'da 1347 di Ismailiyah, Mesir (Bubalo, et.al. 2012: 17). Sepanjang satu dekade, kharisma pemimpin, kekuatan, dan keluasan organisasi ini, menjadikan IM sebagai aktor politik terdepan baik di Mesir maupun di luar negeri. Menurut Al Banna dan muridnya, Islam tidak hanya sebuah agama yang terbatas pada praktik ritual, tapi juga sistem dunia yang memerintah atas semua bidang kehidupan. Al Banna berpandangan bahwa Islam didirikan untuk tiga hal "*Din, duniya wa dawla*" (agama, kehidupan, dan negara). Dalam doktrin IM, prinsip ini diindikasikan dengan konsep "*chumuliyya al-Islam*" (Islam sebagai sistem total). Berkat metode kontrol sosial melalui penggabungan kegiatan sosial yang berlandaskan aktivisme agama, IM dalam beberapa dekade ini telah menjadi aktor sentral dalam bidang politik negara (Amghar, 2008: 68).

Pra-Arab Spring (2010) merupakan masa pencapaian pengaruh IM yang hampir tidak terbayangkan. Hal ini kemudian terbukti dalam kemenangan yang berhasil diraih IM pada pemilihan parlemen Mesir bulan November 2011 sampai Januari 2012, dan lima bulan kemudian, 30 Juni 2012, Muhammad Mursi, seorang tokoh senior IM, menjadi presiden pertama yang terpilih secara demokratis di Mesir (Amghar, 2008: 248).

Namun, kemenangan IM tidak berjalan dengan mulus. Ada serangkaian krisis konstitusional dan politik yang berliku-liku yang menghancurkan negara itu pada musim semi dan musim panas 2012. Kemajuan IM telah memicu tekanan balik yang signifikan dari pejabat tinggi di negara tersebut. Ketegangan di lingkup pemerintahan dan politik Mesir mencapai puncaknya pada pertengahan Juni 2013. Pada Rabu 3 Juli 2013, Mursi resmi digulingkan oleh militer Mesir yang dipimpin Jenderal Abdul Fattah Al Sisi, Kepala Angkatan Bersenjata yang sebenarnya diangkat langsung oleh Mursi menggantikan Jenderal Husein Tantawi dengan dalih untuk mereduksi semua hal yang berbau rezim Mubarak. Sebelum kudeta, Al Sisi telah mengumumkan ultimatum 48 jam menuntut agar Mursi mundur, menahan Mursi pasca kudeta dan menangkap serta menembaki anggota IM yang dianggap pendukung militan Mursi sejak 1 Juli 2013. Bila tidak berhasil, militer akan melakukan kudeta sebagai bentuk penyelamatan negara. Ancaman ini akhirnya benar-benar dilakukan oleh Al Sisi (Al Ayyubi, 2015).



Di saat Mesir, Yordania, Suriah, maupun Arab Saudi, melakukan tindakan represif dan pelarangan terhadap aktivitas gerakan IM, pemerintah Turki justru menerima keberadaan IM di negaranya. AKP sebagai partai berkuasa di Turki telah membiarkan unsur-unsur kunci dari IM Global, dan Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional (*International Union of Muslim Scholars/IUMS*), organisasi pimpinan Sheikh Youssef Qaradawi yang juga merupakan Pemimpin Spiritual IM, untuk dapat beroperasi secara bebas di wilayah Turki. Bahkan sejumlah besar konferensi diadakan di Istanbul, disponsori dan/atau dihadiri oleh pemimpin IM Global. Hal ini telah dilakukan pemerintahan Turki dibawah AKP sejak tahun 2006 (Merley, 2011: 8).

Kedekatan hubungan antara IM dengan Turki yang berimplikasi besar terhadap penerimaan seluruh aktivitas politik IM terkini dapat dirunut pada beberapa peristiwa, antara lain, setelah penggulingan Mursi, ribuan anggota IM yang melarikan diri keluar Mesir diterima oleh Turki; pada bulan Agustus 2014, anggota IM yang berada di Turki diizinkan untuk menciptakan Dewan Revolusi Mesir (*Egyptian Revolutionary Council*) di Istanbul sebagai *platform* anti-rezim yang menganut prinsip Revolusi 25 Januari; dan untuk mencari alat advokasi yang lebih efisien, anggota IM di Turki juga mendirikan saluran TV yang – tidak seperti media pro-oposisi Turki – mendapat dukungan hukum dan finansial dari Perdana Menteri saat itu, Recep Tayyip Erdogan, untuk bertindak sebagai oposisi jauh dalam upaya menyerukan restitusi demokrasi (Magued, 2017: 8).

Dukungan terhadap IM juga diperlihatkan Erdogan dengan berulang kali mengancam kudeta militer di Mesir dan menuduh pemerintahan transisi Mesir, yang dipimpin Al Sisi telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sementara itu, pemerintahan transisi di Mesir menuduh Partai AKP yang dipimpin Erdogan telah mencampuri urusan dalam negeri Mesir. Hubungan diplomatik Mesir-Turki kemudian semakin memburuk, ditandai dengan penarikan duta besar kedua negara (Simsek, 2013). Selain itu, dalam satu kesempatan wawancara pada Februari 2017, menanggapi kebijakan AS untuk memasukkan IM ke dalam daftar organisasi teroris, Erdogan dengan terang-terangan menyebutkan bahwa “secara personal dia tidak menganggap IM sebagai organisasi teroris dan bukan pula kelompok bersenjata, tapi IM sebenarnya merupakan organisasi ideologis” (Middle East Monitor, 2017).

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang faktor apa saja di balik penerimaan gerakan IM di Turki pasca terjadinya gerakan musim semi Arab (*Arab Spring*). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan melakukan studi literatur terhadap berbagai sumber tertulis dan akan dianalisis dengan menggunakan konsep tiga kategorisasi kemunculan gerakan sosial transnasional hingga kemudian diterima



di suatu negara yaitu perubahan lingkungan (*environmental change*), perubahan kognitif (*cognitive change*) dan perubahan relasional (*relational change*).

Landasan Teoretis

Dalam menganalisis fenomena gerakan IM, penulis menggunakan konsep gerakan sosial transnasional yang merupakan salah satu bentuk dari gerakan sosial (*social movement*). Gerakan Sosial Transnasional (*Transnational social movement*) merupakan sekumpulan aktor dengan tujuan dasar yang sama dan solidaritas yang saling terhubung melintas batas negara serta memiliki kemampuan untuk mendorong koordinasi dan keberlanjutan dari mobilisasi sosial di lebih dari satu negara untuk secara lebih luas memengaruhi perubahan sosial (Khagram, et.al 2002: 8). Selanjutnya, ketika gerakan semakin berkembang, peran negara diubah oleh para aktivisnya. Transformasi peran negara berkembang dari perubahan lingkungan, kognitif, dan relasional. Kategori tersebut dapat digunakan untuk menganalisis kekuatan di balik muncul dan berkembangnya tindakan gerakan sosial transnasional, hingga kemudian menyebar dan diterima di suatu negara (Porta, 2005: 7).

1. Perubahan Lingkungan (*Environmental Change*)

Semenjak akhir tahun 1980-an, tiga jenis perubahan dalam lingkungan internasional telah mendorong terbentuknya sebuah aktivitas transnasional. *Pertama*, kehancuran blok Uni Soviet yang mendorong berkembangnya tindakan atau aksi aktor non-negara yang sebelumnya pada era perang dingin dihambat. *Kedua*, perkembangan media komunikasi elektronik dan berkembangannya penerbangan murah. *Ketiga*, meningkatnya *power* korporasi transnasional dan institusi internasional, perjanjian tentang regulasi ekonomi internasional, dan kegiatan-kegiatan berskala internasional seperti *global summit* of World Bank, G8, dan juga WTO (Porta, 2005: 7). Dalam konteks penelitian tersebut penulis melihat perubahan lingkungan yang terjadi merujuk pada peristiwa *Arab Spring* dan perubahan arah kebijakan Turki terkait regional Timur Tengah.

2. Perubahan Kognitif (*Cognitive Change*)

Perubahan kognitif berkaitan erat dengan taktik dan pembingkaiian (*framing*) gerakan sosial yang tampaknya berhasil di lebih dari satu tempat yang telah dilembagakan. Selain itu, taktik dan strategi pemerintah dan kepolisian yang

diadaptasi untuk menantang gerakan pada tingkat transnasional menuntut elaborasi rencana umum untuk aksi kolektif di pihak aktivis (Porta, 2005: 8). Hal ini relevan dengan konteks tantangan yang dihadapi IM di berbagai negara seperti, Mesir, Yordania, maupun Suriah. Sehingga, IM mengambil rencana berbeda agar gerakan mereka tetap eksis, salah satunya adalah dengan beroperasi di Turki melalui serangkaian taktik dan *framing* agar gerakan tersebut diterima.

3. Perubahan Relasional (Relational Change)

Hubungan antara gerakan dan pemerintah merupakan sumber utama perubahan. Gerakan sosial tidak bertindak dalam ruang hampa dan pada kenyataannya, pengaruh terkuat pada perilaku dan taktik mereka adalah perilaku dan taktik dari pemerintah yang mereka tantang. Pada dekade terakhir ini ada fenomena yang menunjukkan bahwa pemerintah juga meniru satu sama lain, oleh karena itu ia mengarah ke peningkatan kesamaan dalam konteks dimana kampanye gerakan dan protes terjadi. Meningkatnya interaksi akan memfasilitasi pertumbuhan identitas umum dan karenanya mengurangi partikularisme nasional (Porta, 2005: 9-10).

Akan tetapi di tengah interaksi lintas negara yang semakin menguat, gerakan sosial tetap berusaha mempertahankan karakter nasional mereka, meskipun tindakan ini terikat pada jenis-jenis peluang politik yang ada di masing-masing negara (Porta, 2005: 10). Peluang politik yang dimaksud di sini, berkaitan erat dengan keterhubungan antara gerakan sosial dan aliansi elit dalam instansi pemerintahan atau intra pemerintahan. Sehingga akan menentukan sejauh mana keberhasilan dari suatu gerakan sosial transnasional.

4. Aliansi Elit (Elite Alliance)

Untuk menjelaskan mengenai hubungan antara elit politik dan gerakan sosial, penulis menggunakan salah satu konsep dari teori struktur peluang politik menurut Beth Schaefer, yaitu Aliansi Elit. Teori struktur peluang politik memiliki tesis bahwa aliansi elit dapat memengaruhi karakteristik gerakan, seperti pilihan taktik, mobilisasi dan tingkat kesuksesan. Ketika simpati elit ada, kemungkinan untuk sukses semakin meningkat, sementara jika simpati elit tidak ada, maka kesuksesan akan sulit didapatkan (Porta, 2005: 155).

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pendekatan gerakan sosial yang diajukan adalah dengan menggabungkan realitas yang tidak tersusun di mana aktivis gerakan dan elit politik sering berbagi keyakinan dan kepentingan yang sama. Birokrat,



legislator, hakim, dan eksekutif mengidentifikasi diri dengan gerakan dan berbagi ideologi dengan orang-orang yang diberi label aktivis (aktor gerakan sosial) (Porta, 2005: 156).

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan Gerakan Ikhwanul Muslimin di Turki Pasca Arab Spring

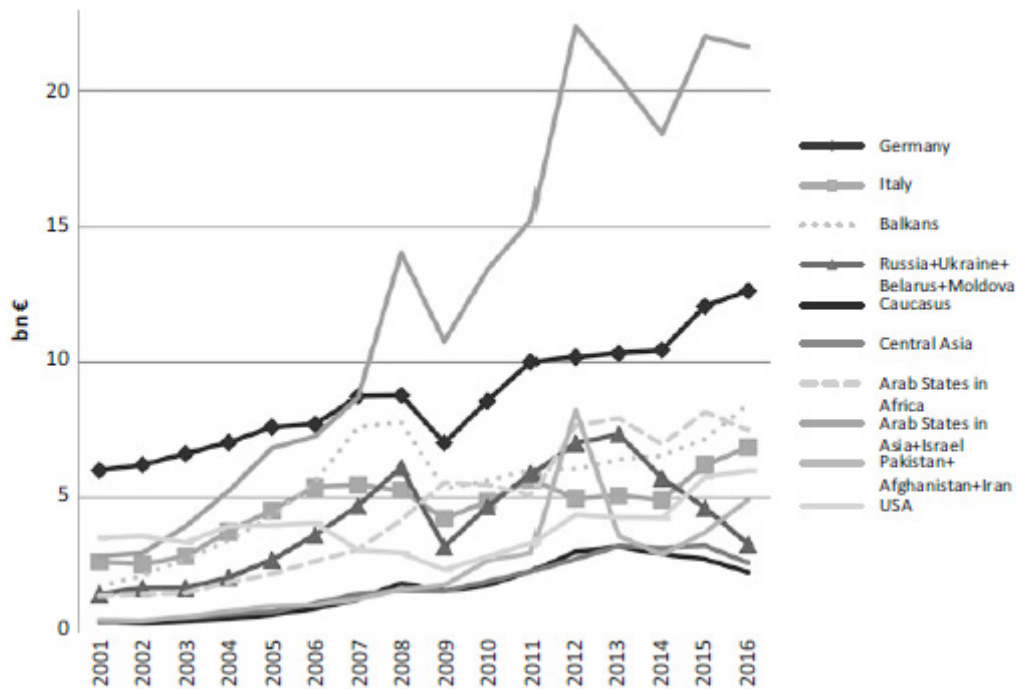
1. Perubahan Lingkungan

Secara geografis, negara Turki terletak di antara Eropa dan Timur Tengah. Dengan posisi seperti ini ia memiliki pengaruh yang unik dan dinamis di kedua wilayah. Selama ini, rezim di Turki memang lebih cenderung membangun kerjasama yang berorientasi Barat, namun dalam satu dekade terakhir, Turki lebih berorientasi pada kebijakan untuk memperkuat perdagangan dan hubungan dengan tetangga di Timur Tengah, pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dan hasrat yang kian agresif untuk berperan dominan di dunia internasional.

Perubahan mulai bergeser semenjak berkuasanya partai AKP di Turki. Di bawah AKP, kebijakan luar negeri Turki yang pragmatis dan inklusif menghasilkan hubungan yang lebih baik dan kerjasama perdagangan bilateral dengan negara-negara tetangganya dan di Timur Tengah, termasuk Iran, meningkat. Hubungan ini dibangun dalam kerangka kebijakan “*no problem*” (*zero-problem*) yang dirancang oleh mantan penasihat khusus Erdogan sekaligus Menteri Luar Negeri Turki, Ahmet Davutoğlu – dan terbilang sangat sukses.

Indikasi atas menguatnya kerjasama ekonomi Turki dan negara Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) terlihat dengan meningkatnya volume ekspor Turki menuju kawasan MENA. Turki juga menyepakati perjanjian bebas visa dan perdagangan bebas dengan Suriah, Maroko, Tunisia, dan Palestina pada tahun 2004, dan dengan Mesir pada tahun 2005. Selama periode ini, kawasan MENA menjadi kawasan dengan pertumbuhan hubungan perdagangan dengan Turki yang paling baik. Ekspor Turki ke kawasan MENA meningkat dari sekitar € 3,2 miliar pada tahun 2002 menjadi hampir € 29 miliar pada 2012, meskipun sempat menurun menjadi € 25 miliar setelah *Arab Spring* serta krisis Suriah-Irak tahun 2014 (Isiksal, 2018: 156). Hal ini sangat wajar, mengingat kondisi kawasan yang sedang tidak stabil.

Berikut ini diagram yang menunjukkan ekspor Turki menuju wilayah dan negara tertentu:



Sumber grafik: Huseyin Isiksal and Oguzhan Goksel (2018:157)

Meningkatnya kerjasama perekonomian dan perdagangan Turki, juga berimbang pada peningkatan ambisi Turki di regional Timur Tengah. Dalam kasus ini, Turki bukan lagi berpandangan untuk memainkan peran kooperatif dan membangun kerjasama ekonomi saja, namun Turki semakin memperjelas kehadiran mereka di negara Timur Tengah. Misalnya, Turki berusaha untuk menengahi perundingan perdamaian antara Israel dan Suriah pada tahun 2008, yang kemudian dihentikan secara tiba-tiba oleh Israel melalui *Operasi Cast Lead* di Gaza pada Januari 2009 (Stuart, 2011: 4). Menurut Henri Barkey dari *Carnegie Endowment for International Peace* yang berbasis di Washington, aksi Turki tersebut menunjukkan sikap “Erdoğan yang ingin dikenang sebagai orang yang membuat Turki menjadi kekuatan global. Dan dia ingin membuktikan kepada dunia bahwa Anda bisa menjadi pemain global dan Muslim pada saat yang sama” (Erdogan, 2011).

Pengaruh ini terbukti berhasil ditanamkan Turki di regional Timur Tengah. Kebijakan kerjasama ekonomi dan perdagangan, serta menghindari segala bentuk permasalahan dengan negara-negara Timur Tengah, menjadi *soft power* yang sangat memengaruhi persepsi negara Timur Tengah terhadap Turki. Berdasarkan penelitian TESEV – sebuah lembaga *think tank* yang berbasis di Istanbul – “*Orta Dogu’da Turkiye Algisi 2010*”, yang dilakukan pada tahun 2010 di beberapa negara Arab Timur Tengah, 80% warga Arab mengekspresikan sikap positif terhadap Turki. Bahkan sebagian

besar responden mendukung pengaruh yang lebih besar dari Turki di wilayah Timur Tengah. Sementara itu, lebih dari 66% memperkirakan bahwa Turki dapat berfungsi sebagai model bagi negara-negara Arab dan merupakan contoh dari perpaduan yang sukses antara Islam dan demokrasi (Hurriyet, 2018). Berdasarkan penelitian tersebut, dapat dikatakan persepsi negara-negara Timur Tengah terhadap Turki sangat positif dan memiliki dampak jangka panjang dalam dinamika kawasan ke depannya.

Pemberontakan massal (*mass uprising/arab revolt*) yang melanda Timur Tengah dan Afrika Utara tahun 2011 telah mengejutkan dunia. Meskipun kurangnya konsistensi dalam tanggapannya terhadap revolusi, mayoritas Muslim Turki telah mengambil kesempatan untuk menyatakan dirinya sebagai pemimpin regional dan internasional (Stuart, 2011: 4). Turki dipandang memiliki peran sentral dalam terjadinya pemberontakan massal yang menjadi penanda meletusnya *Arab Spring*. Alasan ini sangat jelas, mengingat upaya Turki yang tengah berjuang menegosiasikan keanggotaan mereka di Uni Eropa setelah tahun 2005.

Dukungan Turki terhadap *Arab Spring* menjadi posisi tawar sendiri untuk mempersuasi Uni Eropa, karena Turki diberikan kesempatan untuk menegaskan kembali identitas demokrasi mereka dan menjadi pelopor demokrasi di Timur Tengah, di tengah dominasi kepemimpinan yang diktator dan totaliter. Namun, beberapa negara anggota Uni Eropa masih bersifat skeptis terhadap keanggotaan Turki, sebagian karena opini Islamofobik dan berbeda pendapat secara hukum dan normatif tentang peran agama dalam masyarakat, sebagaimana dibuktikan oleh upaya untuk melarang sunat, pemakaian jilbab, pembangunan menara masjid, dan ritual qurban di beberapa negara anggota UE. Sehingga, keinginan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa sekali lagi menemui hambatan (Hurriyet, 2018). Secara umum, gambaran tentang posisi Turki terhadap negara MENA pada saat *Arab Spring* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Posisi Kebijakan Turki Terhadap *Arab Spring*

Arab Spring	Turkey's Stance
Tunisia	Turkish model and trade agreements
Egypt	Problematic relations with the Military government due to Turkish support for Muslim Brotherhood
Libya	Initially wait-and-see policy, later support for NATO operation against Qaddafi. Deteriorationg economic relations due to insecurity
Yemen	Support for Saudi campaign in Yemen. Economic and Military agreements with pro-Saudi groups

Bahrain	Strengthening relationship with Gulf monarchies, playing mediator role
Syria	Support for anti-Assad opposition. From "zero problem with neighbors" to "zero relations with Assad"

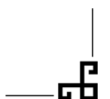
Sumber: *Isiksal dan Goksel (2018:107)*

Di samping itu, *Arab Spring* memiliki implikasi luas terhadap demokratisasi di Timur Tengah yang dapat lebih siap mengakomodasi praktik-praktik keagamaan Islam, sejalan dengan tujuan khusus dari Partai AKP selaku partai penguasa, yang beraliran religius dan konservatif di Turki (Hurriyet, 2018). Bahkan beberapa pendapat menyimpulkan bahwa hubungan Turki yang semakin kuat dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya adalah hasil langsung dari pandangan Islamis AKP, sementara pendapat lain menyatakan bahwa ini terutama merupakan kebijakan pragmatis dan sebagian merupakan reaksi terhadap keengganan Eropa untuk mengakui Turki sebagai bagian dari Uni Eropa (Stuart, 2011: 4).

Dengan demikian, perubahan lingkungan yang terjadi di Turki merupakan rangkaian yang telah terjadi bahkan pasca *Arab Spring*. Pemerintahan Turki sekarang ini yang dipimpin oleh Partai AKP yang sekaligus merupakan partai Islamis pertama yang memimpin Turki, memberikan banyak perubahan dalam lingkungan politik Turki maupun Timur Tengah. Turki yang sebelumnya tidak terlalu memandang Timur Tengah sebagai kawasan strategis mulai berangsur mengarahkan pandangannya menuju Timur Tengah, bahkan memiliki misi untuk menjadi negara yang paling berpengaruh di kawasan. Selain itu, Turki yang sebelumnya terkenal sebagai negara sekuler, perlahan mulai menerima dan berinteraksi dengan kelompok Islamis dan negara Islam. Sehingga, perubahan lingkungan yang sekarang terjadi di Turki, membuka akses yang cukup baik bagi IM yang tengah menghadapi tekanan dari rezim berkuasa di Mesir, untuk masuk dan diterima secara terbuka di Turki setelah *Arab Spring*.

2. Perubahan Kognitif

Perubahan kognitif berkaitan erat dengan taktik dan strategi *framing* (pembingkai) gerakan sosial yang telah berhasil di satu tempat. Perubahan kognitif berupaya untuk mempelajari taktik dan strategi pemerintah atau aparat negara dalam menantang gerakan sosial, sehingga perlu taktik dan strategi *framing* lain dari pihak aktivis. Dalam kasus IM, kegagalan gerakan dalam menggalang perubahan sosial dan politik hingga akhirnya dilarang secara penuh di Mesir pasca

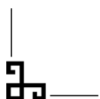


kudeta Mursi, mesti diikuti dengan strategi *framing* dan taktik baru agar diterima di negara lain sebagai upaya mempertahankan eksistensi gerakan.

Framing IM terhadap Turki dapat dicermati dari pernyataan mantan Pemimpin IM Mesir, Mohammed Madi Akef. Dia mengatakan kepada majalah Mesir pada tahun 2005 bahwa dia mengenal Erdogan dan Erbakan semenjak dia tinggal di Turki, dan mereka berdua digambarkannya sebagai “teman baik” (Stuart, 2011: 32). Dari sini dapat dimaknai ada pesan tersirat, bahwa IM berusaha untuk membangun kedekatan dengan Turki melalui kesan positif agar identifikasi mengenai IM di pihak Turki menjadi baik, untuk kemudian dipandang sebagai sahabat atau koalisi yang sangat strategis maupun ideologis.

Selain itu, dari tahun 2006 hingga periode awal pasca revolusi Mesir tahun 2011, Pimpinan IM berulang kali memuji dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Turki. Kemenangan AKP pada pemilihan tahun 2007 mendapat respon positif dari pemimpin IM. Seperti misalnya, Al Ghazali, pemimpin tertinggi IM, menegaskan bahwa keberhasilan berkelanjutan dari kelompok islamis Turki ini (AKP) adalah bukti yang jelas untuk semua rezim bahwa Islam merupakan sistem yang mencakup semua aspek kehidupan. Dia menunjukkan bahwa keberhasilan ini membuktikan bahwa pemilih Turki senang dengan tren Islam moderat yang dibangun AKP. Sementara itu, Al Erian, seorang pemimpin dalam kelompok IM, berpendapat bahwa, “Kemenangan AKP ini membuktikan bahwa orang-orang dari negara-negara Islam cukup dewasa untuk menyatakan identitas dan pilihan mereka secara bebas, selain untuk menunjukkan adanya kekecewaan terhadap tren sekuler, setelah AKP memenangkan 50% dari kursi legislatif. Meskipun ini adalah partai Islam, tetapi AKP mengadopsi apa yang disebut ‘sekularisme yang setia’” Al Erian juga menegaskan bahwa gerakan Islam Turki yang dipimpin oleh Erdogan dan Abdullah Gul berhasil mengubah metode partai menjadi lebih praktis dan pragmatis daripada yang dibangun oleh perancang gerakan Islam Turki, Necmettin Erbakan, khususnya dalam wacana mereka terhadap kaum sekuler dan kemungkinan koeksistensi (pembauran) antara sekuler dan Islamis dalam sistem politik Turki (ikhwanweb.com).

Selanjutnya pada tahun 2009, sekelompok anggota parlemen dari perwakilan IM dan independen yang berjumlah 10 orang, mengunjungi Duta Besar Turki di Kairo, Safak Gokturk, untuk menunjukkan rasa terima kasih dan salam terhadap sikap Erdogan atas debat mengenai Gaza dengan Presiden Israel Shimon Peres di pertemuan Davos. Mereka mengapresiasi penuh reaksi Erdogan yang sangat bersejarah itu. Salah satu anggota parlemen IM, Cema Kura, mengingatkan bahwa Sultan Ottoman, Abdulhamid II, pada abad yang lalu tidak menyerah untuk mempertahankan Palestina



meskipun dia ditawari 45 juta pound. Kura menambahkan, perilaku Erdogan adalah kelanjutan dari teladan sikap yang sama. Erdogan meninggalkan panggung pada diskusi panel tentang Gaza di Forum Ekonomi Dunia setelah ketegangan meningkat antara dia dengan Shimon Peres. Erdogan menyatakan kepada presiden Israel itu, "Suaramu tinggi dan aku tahu itu karena psikologi rasa bersalah. Ketika datang untuk membunuh, kau tahu betul bagaimana cara membunuh. Aku tahu betul bagaimana kau memukul dan membunuh anak-anak di pantai." Erdogan mengatakan bahwa "Anda memiliki perdana menteri yang mengatakan mereka merasa cukup bahagia ketika mereka masuk ke Palestina dengan tank." Erdogan juga mengecam para penonton yang memuji Peres setelah pidatonya, "Saya juga mengutuk orang-orang yang memuji kekejaman ini. Saya percaya bahwa memuji orang-orang yang membunuh anak-anak adalah kejahatan terhadap kemanusiaan" (www.ikhwanweb.com).

Apresiasi atas aksi bersejarah Erdogan pun terus berlanjut. Fraksi Parlemen IM Mesir menyatakan penghargaan mendalam mereka terhadap sikap moral Erdogan, ketika dia menarik diri dari sesi debat setelah moderator konferensi itu terbukti berlaku bias terhadap okupasi dan agresi yang mencolok di Gaza yang menyebabkan 7.000 orang tewas dan terluka. Ketua Fraksi Parlemen IM, Mohamed El-Katatny, mengatakan dalam sebuah pernyataan pers bahwa anggota parlemen IM yang menindaklanjuti dengan seksama bencana kemanusiaan yang menimpa Gaza menyambut sikap berani Erdogan, di depan seluruh peserta pertemuan Davos, dimana juga turut hadir Peres. Erdogan membela warga Gaza yang menjadi korban kekerasan dan pembunuhan tentara Israel. El-Katatny meminta para pemimpin Arab, terutama mereka yang bertemu dengan para pemimpin Israel dalam acara internasional, untuk mengikuti contoh kepemimpinan Turki dalam berurusan dengan Israel yang melakukan pembantaian brutal berdarah dingin seperti itu.

Keberlanjutan dari *framing* IM terhadap Pemerintah Turki dapat pula diidentifikasi pada pertemuan rombongan delegasi pimpinan tertinggi IM dengan Erdogan (pada saat itu dia menjabat sebagai Perdana Menteri Turki) di penginapannya di Kairo, Mesir pada tahun 2011. Kedatangan Erdogan sendiri ke Mesir, dalam rangka menghadiri undangan untuk menyampaikan pidato di Liga Arab (*Arab League*). Delegasi IM yang hadir, dipimpin oleh Pemimpin IM, Dr. Mohamed Badie, eks-Pimpinan IM Mahdy Akef, Wakil Ketua Gomaa Amin, dan Eng. Khairat Al-Shater. Juru bicara IM, Dr. Mahmoud Ghozlan, menggambarkan pertemuan itu sangat ramah dengan perasaan saling menghormati dan menghargai. Di sela-sela pertemuan, delegasi IM juga memberi selamat kepada Erdogan atas kemenangan partainya dalam pemilihan

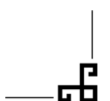
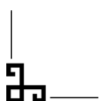


parlemen Turki baru-baru ini, dan menyatakan terima kasih atas sikap Turki terkait serangan Israel terhadap *Freedom Flotilla* dan upayanya untuk mengakhiri blokade Gaza. IM menyerukan agar Turki dan Mesir memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama di berbagai bidang, serta belajar dari pengalaman Turki untuk membantu perekonomian Mesir dengan mendorong investasi di negara itu. Sementara itu, Erdogan menyatakan apresiasinya kepada delegasi IM, menekankan optimisme tentang masa depan Mesir setelah revolusi dan prospek demokrasi, di samping transisi kekuasaan menuju sebuah pemerintahan yang dipilih oleh rakyat (www.ikhwanweb.com).

Di samping itu, dalam mengembangkan *framing* gerakan supaya lebih mengglobal, IM telah melakukan beberapa upaya seperti konferensi pers dan demonstrasi untuk mengutuk Israel yang seringkali diadakan oleh IM Global/ Internasional untuk menuntut agar diadakannya tindakan hukum terhadap para pemimpin Israel, dan mengirim bantuan kepada mereka yang berkonflik dengan Israel (Merley, 2011: 9). Dari tahun 2006 hingga pengiriman armada bantuan untuk Gaza tahun 2010, setidaknya diadakan sepuluh konferensi internasional IM Muslim Global, dimana pemimpin IM Global, Sheikh Youssef Qaradawi, juga turut hadir. Beberapa konferensi hanya terpusat pada masalah Palestina dan Gaza, dengan mengambil tema seperti "Konferensi Masyarakat Dunia untuk Mendukung Palestina", sementara yang lain membahas topik di antara agenda-agenda lain, termasuk dua sesi yang diadakan *International Unions of Muslim Scholar* (IUMS) yang dipimpin oleh Youssef Qaradawi (Merley, 2011: 17).

3. Perubahan Relasional

Hubungan antara gerakan sosial dan pemerintah merupakan sumber utama perubahan. Gerakan sosial tidak bertindak dalam ruang hampa dan pada kenyataannya, pengaruh terkuat pada perilaku dan taktik gerakan sosial adalah perilaku dan taktik dari pemerintah yang mereka tantang. Pada dekade terakhir ini, terjadi fenomena yang menunjukkan bahwa di antara pemerintah juga saling meniru satu sama lain. Oleh karena itu, mengarah ke peningkatan kesamaan dalam konteks dimana kampanye gerakan dan protes terjadi. Meningkatnya interaksi akan memfasilitasi pertumbuhan identitas bersama (*common identity*) dan karenanya mengurangi partikularisme nasional (Merley, 2011: 9-10). Meskipun demikian, tentu saja gerakan sosial tetap berusaha untuk mempertahankan karakteristik nasional mereka tergantung pada peluang politik yang ada (Merley, 2011: 10).



Peluang politik dapat didefinisikan sebagai perubahan dalam lingkungan politik yang memengaruhi “peluang keberhasilan” suatu gerakan sosial. Menurut Eisinger, peluang politik berkonsentrasi pada efek dari “lingkungan politik” yang merupakan “konteks dimana politik terjadi.” Fenomena ini bersesuaian dengan dinamika gerakan IM yang telah tersebar di banyak negara. Hubungan antara IM dan pemerintahan di suatu negara dimana mereka melakukan aktivitas sosial dan politik selalu menekankan pada kondisi domestik. IM menekankan otonomi atas gerakan, tetapi gerakan tersebut tetap disatukan dalam konteks transnasional melalui isu-isu dan perlawanan terhadap sasaran “vertikal” yang sama, seperti kasus Israel-Palestina. Maka dari itu, perubahan relasional sangat penting dijadikan sebagai alat analisis untuk menguji sejauh mana pertentangan antara gerakan sosial dan pemerintah, atau justru menunjukkan adanya peluang politik yang memberikan keleluasaan bagi IM untuk bergerak di dalam satu negara.

Untuk memahami pertentangan antara gerakan IM dan pemerintah yang berkuasa, penjabaran mengenai kondisi terkini yang dihadapi gerakan IM dalam konteks domestik di negara-negara dimana mereka melakukan aktivitas gerakan mesti dipaparkan. Di Mesir sebagai negara kelahirannya, IM seringkali mengalami hubungan yang tidak menentu, tergantung pada rezim yang berkuasa. Suatu waktu IM dinyatakan organisasi resmi, namun bisa saja mereka diklaim sebagai organisasi terlarang dikarenakan aktivitas yang dilakukan. Puncak dari ketegangan antara IM dan Pemerintah Mesir saat ini adalah ketika setelah kudeta 3 Juli 2013, IM dinyatakan sebagai organisasi terlarang di negara Mesir oleh pemerintahan Al Sisi (Magued, 2017: 8). Di Yordania, IM telah menikmati banyak kesuksesan dalam usaha pengorganisasiannya, tetapi juga menghadapi tantangan yang kuat dari rezim yang berkuasa. Pemerintah Yordania membiarkan IM bertindak secara terbuka, mengikuti pemilihan umum dan bahkan memenangkan banyak kursi parlemen, meskipun hasil akhir tetap akan memenangkan faksi-faksi pro-rezim. Sementara dalam kasus Suriah, IM adalah organisasi bawah tanah yang tidak memiliki ruang untuk bertindak di hadapan publik sama sekali (Rubin, 2010: 1-2).

Begitupun dengan di Eropa, impian besar IM untuk menciptakan masyarakat baru melalui pembentukan negara Islam tidak mungkin direalisasikan. Lelahnya retorika Islam dan runtuhnya dorongan utopia dalam Islam telah menyebabkan para pemimpin organisasi ini memperbarui posisi ideologis organisasi tersebut. Jadi, dari tahun 1989 citra Islamisme berubah dengan realisasi ketidakmungkinan kembali ke kemenangan di negara asal. Marginalisasi retorika Islam ditekankan oleh mutasi hebat yang dialami Islam di Prancis dan Belgia pada periode ini. Islam

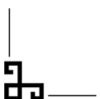


dianggap bukan lagi agama imigran yang bertekad untuk kembali ke negara asal mereka, namun telah menjadi agama dari warga negara yang taat, dan pemahaman ini dianut oleh generasi baru Muslim yang lahir dan dididik di Eropa, serta orang-orang yang mencari Islam di Eropa. Oleh karenanya, IM dapat dipahami sebagai struktur yang berusaha menjadi wakil dan pembela umat Islam di Eropa dan tidak lagi menggaungkan tentang pemberlakuan doktrin IM tentang konsep "*chumuliyya al-Islam*" (Islam sebagai sistem total) (Amghar, 2008: 72).

Dengan demikian, poin penting dari perubahan relasional yang akan penulis jelaskan di sini adalah pada peluang politik (*political opportunities*) dan konsekuensinya pada keberlangsungan gerakan IM. Apalagi setelah pelarangan gerakan secara penuh di Mesir sejak tahun 2013. Mesir dan beberapa negara yang menjadi tempat aktivitas gerakan IM tidak lagi menyediakan lingkungan politik yang kondusif bagi perkembangan IM, bahkan gerakan IM cenderung ditekan oleh rezim yang berkuasa. Penulis tidak akan membahas interaksi IM dalam konteks transnasional, sebab dalam konteks tersebut gerakan IM tidak terlalu menghadapi persoalan. Hal ini dikarenakan, strategi gerakan dalam konteks transnasional yang lebih fleksibel dan cenderung tidak menggunakan nama IM secara eksplisit.

Perubahan relasional antara Pemerintah Turki dan IM pasca dan pra *Arab Spring* dapat dirunut pada beberapa kasus, namun secara keseluruhan relasi yang dibangun mengarah pada hal yang positif. Fakta mengenai tur "*Arab Spring*" Erdogan pada bulan September 2011 sangat diterima dengan baik di Mesir, dan semakin mempertegas kemitraan Erdogan dengan negara-negara Islam. Pada saat kedatangannya, Erdogan disambut oleh banyak orang yang melambai-lambaikan bendera Mesir, Libya, dan Turki, sebuah indikasi dari gambar panggung Turki yang memandu *Arab Spring*; mereka meneriakkan slogan-slogan termasuk "Mesir-Turki: satu kepala" dan "Erdogan sang pemberani, kami menyambut Anda ke rumah kedua Anda." Pidatonya di Liga Arab pun melahirkan dukungan yang luas dari rakyat Mesir. Menurut Mansfield, itu layak disebut "lebih dari ribuan pujian (untuk) hubungan Mesir-Turki" (Stuart, 2011: 9).

Kata-kata Erdogan juga diterima dengan baik oleh IM Mesir, partai Islamis yang dilarang di bawah Mubarak ini sekarang diharapkan dapat memenangkan sebagian besar suara dalam pemilihan Mesir yang akan datang. Aleh Hamudeh, seorang anggota IM dan profesor di Universitas Al-Azhar berkomentar, "Kami menyukainya dan mempercayainya. Perjuangannya untuk orang-orang Muslim di Gaza akan selalu disambut oleh orang Mesir."



AKP telah menjalin kontak dengan IM segera setelah kenaikan Mursi – seorang kader dan anggota IM – yang terpilih menjadi Presiden Mesir pada 2012 melalui pemilihan umum pertama kali sejak tumbangnya rezim diktator Husni Mubarak. dalam sejarah Mesir pada tahun 2012. AKP menyatakan antusiasmenya untuk menjalin kerjasama ekonomi dan politik dengan IM sebagai mitra potensial dalam pelaksanaan visi regional AKP. Rangkaian tujuan kebijakan ini terdiri dari peningkatan saling ketergantungan (interdependensi) ekonomi di antara negara-negara tetangga dan menjamin kelangsungan geografis melalui penghapusan visa dan koordinasi politik. Misalnya, selama masa Mursi sebagai Presiden Mesir, kunjungan diplomatik dipertukarkan, perjanjian ekonomi disimpulkan, dan model pembangunan politik Turki dipromosikan sebagai contoh untuk diikuti di kalangan revolusioner muda Mesir (Stuart, 2011: 9). Mursi juga menandatangani perjanjian pinjaman sebesar 2 miliar dollar untuk memulihkan ekonomi Mesir pasca ketegangan politik yang terjadi (Kotan, 2017).

Dapat dikatakan, pemerintah Turki yang dipimpin partai AKP relatif memberikan prospek yang baik bagi kelangsungan gerakan IM. Kebijakan AKP yang mulai mendekati IM bahkan sebelum *Arab Spring* memperlihatkan tanda-tanda yang baik bagi penerimaan gerakan di Turki. Relasi IM dengan pemerintah Mesir dan negara-negara dimana mereka melakukan aktivitas gerakan, akhir-akhir ini sangat mengancam kelangsungan gerakan. Aktivis IM ditekan dan diteror dimana-mana, gerakan IM juga dianggap sebagai organisasi terlarang sehingga peluang politik yang ada tidak memberikan jaminan bagi eksistensi gerakan. Maka untuk itu, perubahan relasional antara IM dan Turki merupakan pertanda baik bagi gerakan IM untuk tetap mempertahankan eksistensi gerakannya.

4. Aliansi Elit

Berdasarkan pada konsep aliansi elit dapat diketemukan titik konvergensi antara IM dan Pemerintah Turki. Dalam hal ini, IM menunjukkan bahwa gerakan sosial tidak mesti harus menentang pemerintah, namun bisa jadi berbagi kepentingan yang sama. Kepentingan tersebut bisa saja didasari atas kesamaan ideologi dan kepentingan.

Hubungan ideologis antara IM dan AKP memiliki akar dalam perkembangan historis AKP. Sejak didirikan pada tahun 1960-an, *milli gorus* gerakan Islamis Turki yang menjadi embrio kemunculan AKP saat ini, melihat dirinya sebagai bagian dari jaringan gerakan Islamis yang lebih besar. Hal ini paling jelas terlihat dalam kasus

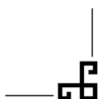
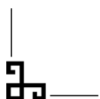


Partai Refah (Kesejahteraan), yang didirikan pada tahun 1983 dan menjadi partai berkuasa Turki pada tahun 1996 dan 1997 sebagai mitra koalisi dominan — dan pemerintahan Turki pertama yang dipimpin oleh partai islamis — sampai Mahkamah Konstitusi menggulingkannya atas dasar anti-kegiatan sekuler dalam “kudeta pasca-modern” pada Februari 1997.

Kedekatan hubungan antara IM dan Partai Refah dapat ditelusuri pada Kongres Partai Refah yang diadakan tahun 1993 dan 1996. Pada kongres tersebut, Partai Refah juga melibatkan perwakilan IM dari Mesir dan Tunisia. Selain itu, dalam hal ketegangan antara IM dan Mubarak, Partai Refah bahkan pernah terlibat menengahi antara IM dan rezim Mubarak pada tahun 1996. Sikap Politik yang ditunjukkan Refah berkaitan dengan visi kebijakan luar negeri partai, dimana Turki dipandang sebagai pemimpin politik dunia Muslim yang lebih besar.

Namun lebih jauh dari itu, Erbakan (mantan pemimpin Turki) dan Erdogan (Pemimpin Turki saat ini) memiliki akar historis dan ideologis yang kuat dengan IM. Erbakan yang dikenal sebagai bapak Islam Politik Turki, diketahui sangat dipengaruhi oleh pemikiran Al Banna maupun Qutb. Bahkan, Pengamat Perancis Olivier Carre sampai menyebut Erbakan sebagai “Qutbist” (Carre, 2001: 92). Dari tahun 1960-an, Erbakan dipandang memiliki andil yang besar dalam melakukan transmisi ide IM menuju Turki. Sehingga, kedekatan yang dia bangun dengan IM semasa berkuasa di Turki, dapat dikatakan merupakan hasil dari kesamaan ideologi dan pemikiran.

Setelah era Erbakan, Erdogan dianggap sebagai penerus dan kader terbaik yang banyak belajar dari Erbakan. Erdogan diketahui pertama kali bersinggungan dengan IM adalah sewaktu ia terlibat aktif di WAMY (*World Assembly of Muslim Youth*) pada awal tahun 1970-an. WAMY sendiri diketahui sebagai organisasi yang memiliki hubungan dekat dengan IM Global. Fakta ini diperkuat oleh pernyataan El-Helbawy, ketika di WAMY dia juga bertemu mantan Presiden Afghanistan Burhanuddin Rabbani, Anwar Ibrahim, dan Tayeep Erdogan (Carre, 2001: 31). Selama kepimimpinannya Erdogan pun cenderung mengarahkan Turki pada akar Islamis, sebagaimana visi IM. Hal ini dapat dilihat pada diterapkannya kebijakan pendidikan yang bertujuan menciptakan “generasi saleh” (*Pious Generation*). Narasi untuk membangkitkan kembali semangat “Muslim Beriman” menjadi sangat dominan selama 10 tahun terakhir (Alaranta, 2015: 20). Dengan membangun identitas demikian dalam corak politik Turki, bisa dikatakan ideologi dan pengaruh pemikiran IM turut membentuk cara pandang (*worldview*) dan cara kepemimpinan Erdogan.



Selain itu, alasan kuat AKP untuk menjalin hubungan strategis dan ideologis dengan IM adalah perubahan arah kebijakan Turki yang mulai melihat Timur Tengah sebagai titik referensi utama. Sehingga, hubungan dengan IM menjadi faktor sentral dalam memperluas jangkauan Turki di kawasan Timur Tengah (carnegieendowment.org). Alasan ini dilatarbelakangi oleh pengaruh IM sebagai gerakan sosial transnasional yang memiliki jaringan, baik secara rahasia maupun terbuka yang meliputi semua lapisan masyarakat di Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) (Korybko, 2017).

Sedangkan, faktor ideologis yang berperan dalam kedekatan AKP dan IM adalah terkait dengan misi Turki untuk menghidupkan kembali *neo-Ottomanism*. Ide *Neo-Ottomanism* merupakan keinginan Turki mengembalikan statusnya sebagai penguasa di seluruh bekas wilayah eks-kekuasaan Ottoman. Ide ini sebagian didorong oleh perhitungan strategis yang diajukan oleh mantan Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri Turki, Ahmet Davutoglu, dan kemudian ide ini diteruskan oleh Presiden Erdogan (Korybko, 2017). Kedekatan pemerintah Turki dengan IM menjadi bersifat ideologis, dikarenakan misi dan tujuan yang sama, dimana IM juga memiliki tujuan untuk menegakkan kekhilafahan di muka bumi ini, sejalan dengan misi yang tengah dibangun oleh Pemerintah Turki di bawah AKP.

Dengan demikian, aliansi elit yang terbangun antara elit politik Turki dan gerakan IM menjadi salah satu faktor di balik penerimaan IM di Turki. Kesamaan kepentingan dan ideologi ini didukung oleh fakta historis yang membuat gerakan sosial dan pemerintah saling berkait. Kedekatan inilah yang kemudian menciptakan peluang politik atau lingkungan politik yang kondusif bagi eksistensi gerakan, setelah mengalami resistensi, represi, dan penolakan di negara-negara lain.

Kesimpulan

Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah gerakan transnasional, dengan definisi 'sekumpulan aktor dengan tujuan dasar yang sama dan solidaritas yang saling terhubung melintas batas negara serta memiliki kemampuan untuk mendorong koordinasi dan keberlanjutan dari mobilisasi sosial di lebih dari satu negara untuk secara lebih luas memengaruhi perubahan sosial'. Dalam upayanya mengusung ide-ide globalnya, IM mengalami penolakan hingga represi di berbagai negara, namun sebaliknya, mendapatkan penerimaan di Turki. Dengan menggunakan konsep tiga kategorisasi kemunculan gerakan sosial transnasional hingga kemudian diterima di suatu negara yaitu perubahan lingkungan (*environmental change*), perubahan kognitif (*cognitive change*) dan perubahan relasional (*relational change*), penulis



menemukan bahwa ada beberapa faktor di balik penerimaan gerakan *Ikhwanul Muslimin* di Turki. *Pertama*, adanya perubahan lingkungan di Turki, dimana Turki sekarang ini dikuasai oleh kelompok Islamis (Partai AKP) yang lebih berorientasi pada kebijakan untuk memperkuat perdagangan dan hubungan dengan tetangga di Timur Tengah, pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dan hasrat yang kian agresif untuk berperan dominan di dunia internasional. Perubahan pemerintahan di Turki ini menjadi salah satu faktor penyebab diterimanya gerakan IM di Turki. *Kedua*, melalui perubahan kognisi, IM beroperasi di Turki melalui serangkaian taktik dan *framing* agar gerakan tersebut diterima; antara lain dengan memberikan berbagai pujian dan dukungan kepada Erdogan. *Ketiga*, dalam menghadapi pelarangan di berbagai negara, IM berupaya mencari peluang politik di negara-negara lain demi mempertahankan eksistensi gerakannya. Turki memberikan kesempatan yang luas bagi IM dikarenakan keterikatan historis para pemimpin Turki (Erbakan dan Erdogan) dengan IM. *Keempat*, pada kategorisasi perubahan relasional ditemukan keterhubungan antara sebuah gerakan sosial dengan elit dalam pemerintahan yang dapat dijelaskan dengan konsep aliansi elit, dimana antara gerakan sosial dan pemerintahan yang berkuasa juga bisa saling berbagi kepentingan atas dasar kesamaan ideologi dan pandangan.

Daftar Pustaka

- Abadi, S., dan Ay'yash, A. (2007). Experts: Erdogan's Win Milestone for Moderate Islamic Movements. [Online] *IkhwanWeb*. Dalam: <http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=1035> [Diakses 7 september 2018].
- Al-Ayyubi, M. C. (2015). *Militer dan Politik: Studi Kasus Kudeta Militer Pada Presiden Mohammad Mursi di Mesir Tahun 2013*. Skripsi Sarjana. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Alaranta, T. (2015). *Turkey Under AKP: A Critical Evaluation From the Perspective of Turkey's EU Negotiations*. Helsinki: The Finnish Institute of International Affairs.
- Amghar, S. (2006). Les islamistes à l'épreuve de l'Europe. Dalam: S. Amghar, ed., *Islamismes d'Occident. Etats des lieux et perspectives*. Paris: Lignes de repères.
- Arslantas, D. (2013). *The Political Analysis of the Muslim Brotherhood and the AKP Tradition: Why did Turkish Model Fail in Egypt*. Master Thesis. Ankara: Middle East Technical University.

- Aydin-Duzgit, S. (2014). The Seesaw Friendship Between Turkey's AKP and Egypt's Muslim Brotherhood. [Online] *CarnegieEndowment*. Dalam: <http://carnegieendowment.org/2014/07/24/seesaw-friendship-between-turkey-s-akp-and-egypt-s-muslim-brotherhood-pub-56243> [Diakses 25 Maret 2018].
- Bubalo, A., Fealy, G., dan Mason, W. (2012). *Zealous Democrats: Islamism and Democracy in Egypt, Indonesia and Turkey*. Terj: Syamsu Rijal (Komunitas Bambu). Ankara: Lowy Institute for International Policy.
- Cagaptay, S. (2009). We Are Witnessing the Muslim's Brotherhood Take on Turkish Foreign Policy. [Online] *Gate Stone Institute*. Dalam: <http://www.hudson-ny.org/883/we-are-witnessing-the-muslims-brotherhood-take-on-turkish-foreign-policy> [Diakses 9 September 2018].
- Caniglia, B. S. (2002). *Elite Alliances and Transnational Environmental Movement Organizations*. dalam *Globalization and Resistance: Transnational Dimensions of Social Movements*. Maryland: Rowman and Littlefield Publisher.
- Carré, O. (2001). *A L'Ombre du Coran' révisité: Les lendemains possibles de la pensée de Sayyid Qutb et du 'Qutbisme*, Arabica 48.
- Giugni, M. (1999). How Social Movements Matter: Past Research, Present Problems, Future Developments. Pp. xiii–xxxiii. Dalam: Marco Giugni, Doug McAdam, and Charles Tilly, ed. *How Social Movements Matter*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Hurriyet Daily News, (2018). *Turkey's Role in the Arab Spring*. [Online] Dalam: <http://www.hurriyetaidailynews.com/opinion/soner-cagaptay/turkeys-role-in-the-arab-spring--23296> [Diakses 7 Agustus 2018].
- Ikhwan Web, (2011). *MB Chairma and Delegation Visit Erdogan*. [Online] Dalam: <http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=29034> [Diakses 8 september 2018].
- Isiksal, H, dan Goksel, O., eds. (2018). *Turkey's Relations With Middle East: Political Encounters after the Arab Spring*. Cham: Springer International Publishing.
- Kalabalik, A. A. (2009). Egypt's Muslim Brotherhood Thanks Turkey's Erdogan. [Online] *IkhwanWeb*. Dalam: <http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=19167> [Diakses 10 September 2018].

- Khagram, S., Riker, J.V., dan Sikkink, K., eds. (2002). *Restructuring World Politics: Transnational Social Movement, Networks, and Norms*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Korybko, A. (2017). The Global Blueprint for Neo-Ottomanism: Soft Power: Part I. [Online] *Katehon*. Dalam: <http://katehon.com/article/global-blueprint-neo-ottomanism-soft-power-part-i> [Diakses 6 Agustus 2018].
- Kotan, B.N. *An Overview of Turkish Egyptian Relations Since the Arab Spring*. [online] Dalam: <https://www.trtworld.com/mea/an-overview-of-turkish-egyptian-relations-since-the-arab-uprising-12658> [Diakses 5 september 2018].
- Kuncahyono, T. (2013). *Tahrir Square Jantung Revolusi Mesir*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Magued, S. (2017). *The Egyptian Muslim Brotherhood's Transnational Advocacy in Turkey: A New Means of Political Participation*. UK: British Journal of Middle Eastern Studies.
- Merley, S. G. (2011). *Turkey, The Global Muslim Brotherhood, and the Gaza Flotilla*. Jerusalem: Jerusalem Centre for Public Affairs.
- Middle East Monitor. (2017). *Turkey's Erdogan: Muslim Brotherhood is Ideological, not Terrorist Organisation*, [online] Dalam: <https://www.middleeastmonitor.com/20170217-turkeys-erdogan-muslim-brotherhood-is-ideological-not-terrorist-organisation> [Diakses 26 Maret 2018].
- Munhanif, A. Berakhirnya Revolusi Tanpa Ideologi. *Gatra*, September 24, 2013.
- Porta, D. D. dan Tarrow, S., eds. (2005). *Transnational Protest and Global Activism: People, Passions, and Power*. Lanham: Rowman and Littlefield Publisher.
- Reuters. (2011). *Erdogan: The boy bread vendor who changed Turkey*'. [online] Dalam: <http://in.reuters.com/article/2011/06/09/idINIndia-57598520110609> [Diakses 25 Juli 2018].
- Rubin, B, eds. (2010). *The Muslim Brotherhood: The Organization and Policies of a Global Islamist Movement*. New York: Palgrave Macmillan.
- Simsek, A. 2013. Dukungan Erdogan Terhadap Ikhwanul Muslimin di Kritik. [online] *Deutsche Welle*. Dalam: <http://www.dw.com/id/dukungan-erdogan-terhadap-ikhwanul-muslimin-dikritik/a-17044458> [Diakses 26 Maret 2018].

Smith, J., Chatfield, Charles., dan Pagnucco, Ron., eds. (1997). *Transnational Social Movements and Global Politics: Solidarity Beyond The State*. New York: Syracuse University Press.

Smith, J. (2003). Transnational Social Movement. Dalam: David A. Snow, Donatella della Porta, Bert Klandermans, dan Doug McAdam, ed., *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

Stuart, H. (2011). *Turkey and the Arab Spring*. London: the Henry Jackson Society.

Tarrow, S. (1998). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. New York: Cambridge University Press.

